

TESIS

MODEL INFORMASI KINERJA ANGGARAN TEMATIK BENCANA PADA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Disusun Oleh:

NAMA : GALIH ANGGRIAWAN
NOMOR POKOK : 2243021082
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr. APN)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIALAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA

2023

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

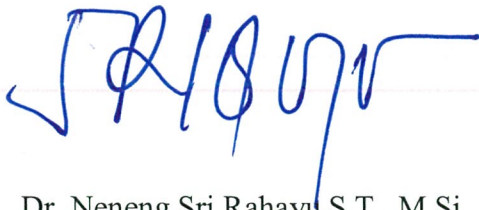
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Galih Anggriawan
NPM : 2243021082
Jurusan : Administrasi Pembangunan Negara
Program Studi : Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Disaster Thematic Budget Performance Information Model at the Directorate General of Budget, Ministry of Finance*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si.



Prof. Dr. R. Luki Karunia SE.Ak.MA

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : GALIH ANGGRIAWAN
NPM : 2243021082
JURUSAN : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
PROGRAM STUDI : MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : MODEL INFORMASI KINERJA ANGGARAN
TEMATIK BENCANA PADA DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 November 2023
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS


Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A.

Sekretaris : Dr. Hamka, M.A.

Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Pembimbing 1 : Prof. Dr. R. Luki Karunia, M.A.

Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and below it]

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Anggriawan

NPM : 2243021082

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 13 November 2023



Penulis

Galih Anggriawan

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah subhānahu wata‘ālā, atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan”.

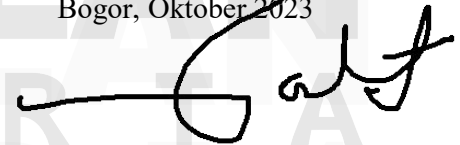
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia SE.Ak. MA selaku Dosen Pembimbing II.
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Oktober 2023



Galih Anggriawan

ABSTRAK

Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Galih Anggriawan, Neneng Sri Rahayu, Luki Karunia

galih.2243021082@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan membuat suatu model logika anggaran tematik bencana pasca diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada institusi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis data dan dokumen. Teori Model Logika Knowlton dan Phillips (2013) serta McLaughlin dan Jordan (2015) adalah teori yang dipakai sebagai pisau analisis utama diperkuat dengan regulasi manajemen kebencanaan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada pengalokasian anggaran yang melibatkan banyak Kementerian/Lembaga. Informasi kinerja anggaran yang dibangun oleh masing-masing Kementerian/Lembaga belum dapat mencerminkan sinergi kegiatan berpola lintas yang didanai APBN sebagaimana konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Dalam upaya menjamin belanja yang berkualitas, Direktorat Jenderal Anggaran sebagai perumus kebijakan di bidang penganggaran dapat melakukan optimalisasi penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dengan menyusun model logika program anggaran tematik bencana beserta indikator kerjanya yang komprehensif sebagai solusi.

Kata kunci: redesain perencanaan dan penganggaran, penanggulangan bencana, model anggaran tematik.

ABSTRACT

Disaster Thematic Budget Performance Information Model at the Directorate General of Budget, Ministry of Finance

Galih Anggriawan, Neneng Sri Rahayu, Luki Karunia
galih.2243021082@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to analyze and create a disaster thematic budget logic model after the implementation of the Planning and Budgeting System Redesign at the Directorate General of Budget, Ministry of Finance. The method used is a qualitative descriptive research method with a case study approach. Data collection was carried out by interviews, data and document analysis. The Logical Model Theory of Knowlton and Phillips (2013) and McLaughlin and Jordan (2015) is the theory used as the main analytical tool which is strengthened by applicable disaster management regulations. The research results show that the implementation of the Planning and Budgeting System Redesign in budget allocation involving many Ministries/Institutions is not yet optimal. Budget performance information developed by each Ministry/Institution cannot yet reflect the synergy of cross-patterned activities funded by the APBN as per the concept of Planning and Budgeting System Redesign. In an effort to guarantee quality spending, the Directorate General of Budget as a policy formulator in the field of budgeting can optimize the implementation of the Planning and Budgeting System Redesign by developing a logic model for the disaster thematic budget program along with comprehensive performance indicators as a solution.

Keywords: planning and budgeting redesign, disaster management, thematic budget model

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I Permasalahan Penelitian	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Kebijakan.....	27
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..	27
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.....	28
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	29
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.....	30
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.....	31
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	32
7. Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	34
8. Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-122/MK.02/2020 dan B 157/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.....	35

C. Tinjauan Teoritis.....	39
1. Administrasi Publik.....	39
2. Manajemen Keuangan Publik	41
3. Anggaran Sektor Publik.....	42
4. Penganggaran Berbasis Kinerja.....	48
5. <i>Logic Model Theory</i>	51
6. <i>Disaster Management Cycle</i>	56
D. Kerangka Berpikir.....	58
 BAB III Metodologi Penelitian	
A. Metode Penelitian.....	59
B. Teknik Pengumpulan Data.....	60
1. Wawancara.....	60
2. Observasi.....	61
3. Analisis Dokumen.....	62
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	63
D. Instrumen Penelitian.....	66
1. Pedoman Wawancara.....	66
2. Pedoman Telaah Dokumen.....	67
3. Pedoman Observasi.....	67
4. Alat Tulis.....	67
5. Alat Bantu Rekaman (<i>Handphone</i> , Kamera, Laptop).....	68
 BAB IV Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum, Program, dan Kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran.....	69
B. Hasil Penelitian.....	72
1. Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Pusat berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran... ..	72
2. Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana dalam rangka Optimalisasi Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran (RSPP).....	104
3. Rekapitulasi Triangulasi Hasil Analisis Data Penelitian.....	135

BAB V Simpulan dan Saran

A. Simpulan.....	137
B. Saran.....	139
1. Saran bagi unit organisasi yang menjadi lokus analisis.....	139
2. Saran bagi penelitian selanjutnya.....	140
Daftar Pustaka.....	141
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup Penulis	



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kejadian Bencana di Indonesia Sepanjang 2022	2
Gambar 1.2 Bencana Menurut Wilayah (Propinsi).....	3
Gambar 1.3 Pagu Anggaran Penanggulangan Bencana pada BNPB.....	6
Gambar 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan Lintas.....	34
Gambar 2.2 Redesain Program Kementerian Keuangan.....	36
Gambar 2.3 <i>Logical Framework</i>	37
Gambar 2.4 Hubungan Interaksi Informasi Kinerja.....	38
Gambar 2.5 Perumusan Sasaran Kinerja Ideal.....	38
Gambar 2.6 Komponen Dasar <i>Logic Model</i>	52
Gambar 2.7 <i>Steps in Creating a Program Logic Model</i>	53
Gambar 2.8 <i>Disaster Management Cycle</i>	56
Gambar 2.9 Kerangka Berfikir Penelitian.....	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan.....	71
Gambar 4.2 Kegiatan dan Pendanaan Bencana.....	74
Gambar 4.3 Sumber Pendanaan Bencana.....	75
Gambar 4.4 Struktur Anggaran Penanggulangan Bencana Pemerintah Pusat.....	76
Gambar 4.5 Struktur Penganggaran K/L (RSPP).....	77
Gambar 4.6 Observasi Referensi Anggaran Tematik pada Database SAKTI.....	81
Gambar 4.7 Klasifikasi Anggaran Pra Bencana.....	89
Gambar 4.8 Struktur Desa Tangguh Bencana.....	92
Gambar 4.9 Grafik Pendanaan Penanggulangan Bencana.....	101
Gambar 4.10 Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran.....	110
Gambar 4.11 FGD Kelompok Kerja Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi Kebencanaan.....	114
Gambar 4.12 Model Logika Program Penanggulangan Bencana.....	131

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Alokasi Anggaran Bencana dalam APBN.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.2	Pendanaan Penganggulangan Bencana menurut UU 24 Tahun 2007...	28
Tabel 2.3	Pendekatan <i>Money Follows Function</i> dan <i>Money Follows Program</i> ...	30
Tabel 2.4	Anggaran Tematik 2009-2014.....	34
Tabel 3.1	Daftar Partisipan.....	61
Tabel 3.2	Daftar Permintaan Data Dokumentasi.....	62
Tabel 4.1	Program/Kegiatan Teknis pada Ditjen Anggaran.....	70
Tabel 4.2	Klasifikasi Kode Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kebencanaan.....	79
Tabel 4.3	Program/Kegiatan BNPB.....	84
Tabel 4.4	Kegiatan dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana.....	86
Tabel 4.5	Kegiatan dalam Potensi Terjadi Bencana.....	88
Tabel 4.6	Alokasi Anggaran Pra Bencana pada Kementerian/Lembaga.....	89
Tabel 4.7	Identifikasi Kegiatan Tanggap Darurat pada Kementerian/Lembaga...	93
Tabel 4.8	Alokasi Anggaran Tanggap Darurat pada Kementerian/Lembaga.....	94
Tabel 4.9	Identifikasi Kegiatan Dana Siap Pakai.....	96
Tabel 4.10	Identifikasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	97
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran Pasca Bencana pada K/L.....	98
Tabel 4.12	Rekapitulasi Anggaran Penanggulangan Bencana.....	100
Tabel 4.13	Rekapitulasi Klasifikasi Rincian Output (KRO) 2021-2023.....	103
Tabel 4.14	Penandaan Tematik dalam Sistem KRISNA.....	104
Tabel 4.15	Referensi Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	106
Tabel 4.16	Struktur Informasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga.....	109
Tabel 4.17	Penyeragaman Informasi Kinerja Penanggulangan Bencana.....	112
Tabel 4.18	Intervensi Pemerintah pada Program Penanggulangan Bencana.....	124
Tabel 4.19	Identifikasi Keluaran/Output pada tahap pencegahan dan mitigasi....	125
Tabel 4.20	Identifikasi Keluaran/Output pada tahap kesiapsiagaan.....	127
Tabel 4.21	Identifikasi Keluaran/Output pada tahap Tindakan.....	128
Tabel 4.22	Identifikasi Keluaran/Output pada tahap Pemulihan.....	129
Tabel 4.23	<i>Checklist</i> Model Logika Program Penanggulangan Bencana.....	134
Tabel 4.24	Ringkasan Hasil Analisis Tema dan Triangulasi.....	136

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Secara geografis lokasi Indonesia berada di muara lempeng tektonik Benua Asia dan Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Bagian selatan dan timur Indonesia terletak sabuk vulkanik yang berjejer dari Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Di pulau Sulawesi garis pantainya merupakan rangkaian gunung api usia tua serta dataran rendah yang dominan merupakan rawa-rawa. Akibat posisi geografis tersebut, Indonesia mempunyai potensi tinggi serta rawan bencana yang dapat melanda negeri. Bencana alam yang pernah terjadi ialah gempa bumi, tsunami, ledakan gunung berapi, banjir, serta tanah longsor. Data ilmiah memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai peringkat kejadian gempa yang berkategori tinggi di dunia, hal ini lebih tinggi 10 kali lipat daripada peringkat keterjadian gempa di *United States of America* (Arnold, 1986).

Pergerakan lempeng dan gunung berapi di wilayah Indonesia membawa berkah sumber daya alam seperti tanah yang subur *gemah ripah loh jinawi*, namun sisi lain juga membentuk potensi risiko bencana. Indonesia juga di apit oleh dua Samudra yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang berdampak Indonesia beriklim tropis sehingga mempunyai tingkat curah hujan yang bervariasi. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, hingga kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab bertambahnya risiko bencana di Indonesia (Putri, 2022).

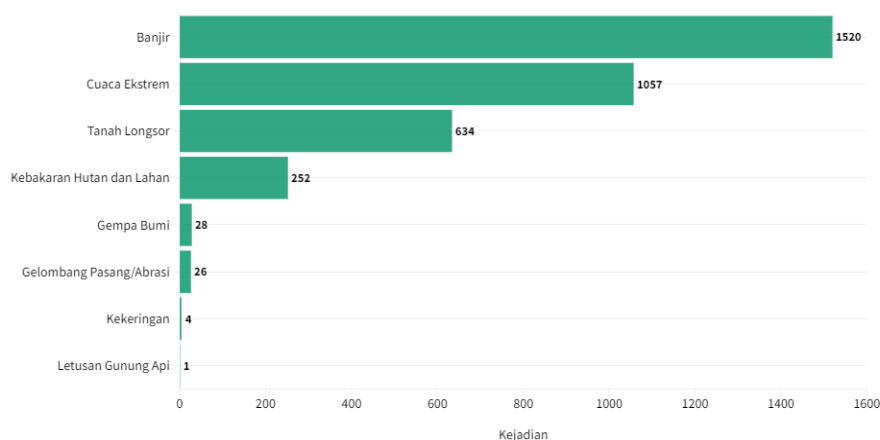
Situasi Indonesia yang memiliki risiko bencana yang tinggi pada akhirnya memerlukan kesiapan yang menyeluruh untuk mitigasi bencana. Penanganan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan ruang lingkup pemberian layanan publik yang prima kepada masyarakat dengan pembangunan sistem pemerintahan maupun penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Pemberian layanan publik dalam menghadapi bencana ini merupakan bagian dari administrasi negara yang berkaitan dengan birokrasi yang meliputi pemerintahan, masyarakat, dan kebijakan publik. Birokrasi merupakan elemen penting dalam negara yang

kehadirannya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sistem administrasi negara di bangun dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada rakyatnya yang dikenal dengan birokrasi pemerintahan (DJKN Kemenkeu, 2022).

Likuifaksi di Palu, gempa bumi, letupan Gunung Merapi, dan banjir merupakan kejadian peristiwa-peristiwa bencana di Indonesia pada kurun tiga tahun terakhir (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-4583223>, diakses 2023). Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia tahun 2022, secara otomatis mewajibkan pemerintah untuk turut hadir dalam penanggulangan bencana dalam menjaga ketentraman kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hingga akhir Desember 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengidentifikasi sebanyak 3.383 peristiwa bencana yang melanda Indonesia penyebab utamanya yaitu bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem. Baru-baru ini terdapat bencana yang membawa kerusakan yang berat juga terjadi di Kabupaten Cianjur yaitu gempa bumi skala 5.6 skala *richter*. Di wilayah yang lain juga terdapat awan panas guguran yang disebabkan naiknya aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Kala itu, Gunung Semeru sempat berstatus level IV atau *awas* (BNPB, 2022).

Bencana alam yang terjadi di Indonesia tergolong intensitas tinggi serta mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan berdampak pada APBN (Nota Keuangan 2023, p.6-57). Grafik peristiwa bencana tahun 2022 ialah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kejadian Bencana Alam di Indonesia Sepanjang 2022

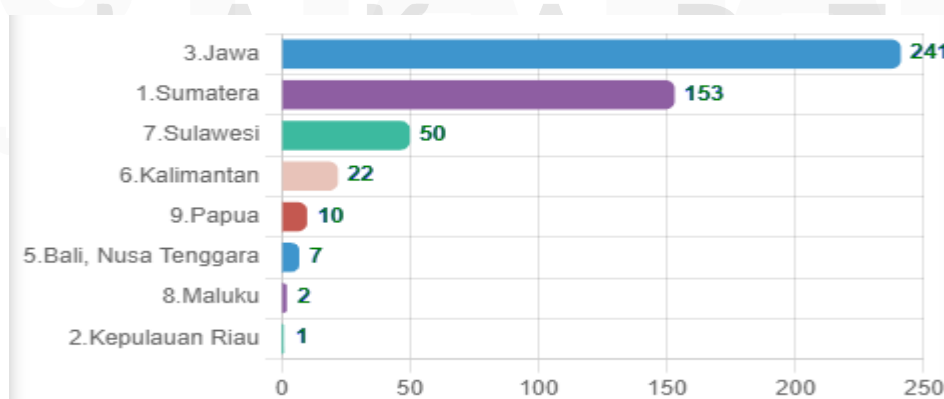


Sumber: BNPB, 2022

BNPB memberikan laporan bahwa telah terjadi 3.522 bencana alam pada tahun 2022. Banjir adalah bencana alam urutan pertama yang kerap terjadi yaitu 1.520 kali. Cuaca ekstrem sebagai dampak *La Nina* menyusul di urutan kedua dengan angka 1.057 kejadian. Selanjutnya tanah longsor tercatat ada 634 kejadian. Kemudian kebakaran lahan dan hutan terjadi 252 kali. Gempa bumi sebanyak 28 kejadian. Gelombang pasang/abrasi terjadi 26 kali. Kekeringan dan meletusnya gunung api terjadi empat kejadian serta satu kejadian pada 2022. Kerugian bencana alam tersebut berakibat pada 851 orang meninggal, 8.726 orang mengalami luka-luka, serta 46 orang dilaporkan hilang. Pengungsi akibat bencana mencapai angka 5,42 juta disebabkan bencana alam tersebut. Kerugian materiil tercatat 94.990 rumah warga, 1.980 sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan terpantau rusak akibat bencana alam di Indonesia (*dataindonesia.id*, 2022).

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia dengan melihat penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Penilaian IRBI ini dilaksanakan melalui penghitungan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas di masing daerah. Berdasarkan hasil IRBI tahun 2021, sebanyak 293 Kabupaten/Kota mempunyai Indeks Risiko Sedang 221 Kabupaten/Kota Indeks Resiko Tinggi. Sedangkan Menurut *The World Risk Indeks* Tahun 2021, Indonesia menempati urutan 38 dari 181 negara paling rentan terjadi bencana (<https://relief.web.int/files/resources/2021-world-risk-report.pdf>).

Gambar 1.2 Bencana Menurut Wilayah (Propinsi)



Sumber: dibi BNPB 2023

Pulau Jawa merupakan provinsi tertinggi dalam kejadian bencana alam hingga mei 2023, yaitu 241 kejadian. Selanjutnya diikuti Pulau Sumatera sebanyak 153

kejadian serta Pulau Sulawesi dan Kalimantan masing-masing sebanyak 50 dan 22 kejadian. Presiden mengatakan bahwa perubahan iklim secara global merupakan penyebab utama naiknya frekuensi kejadian bencana dan memberikan dampak terhadap keselamatan manusia (BNPB, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah mempunyai kewajiban melakukan program penanggulangan bencana, yang merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi tumpah darah Indonesia sesuai pembukaan UU Dasar 1945. Terkait dengan wilayah yang sering dilanda bencana, alokasi anggaran dalam penanganan bencana merupakan sesuatu yang vital. Pada wilayah rawan bencana, alokasi anggaran penanggulangan bencana masih sangat minim (Putra dan Matsuyuki, 2019).

Sebagai amanah peraturan perundangan dalam menyikapi bencana yang kerap terjadi, pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi pengelolaan risiko bencana, terutama dalam bentuk kesiapan pendanaan. APBN hadir untuk dalam rangka pendanaan dalam penanganan terjadinya bencana, dimulai tahap pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana melalui berbagai perencanaan serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Kapasitas pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk bencana yang mempunyai dampak besar cenderung terbatas (Menteri Keuangan, 2018). Kerugian yang disebabkan oleh bencana alam tergolong tinggi. Pemulihan pasca bencana pada gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 menyentuh angka Rp51,4 triliun sehingga dibutuhkan waktu *recovery* pasca bencana lebih dari 5 tahun. Ketimpangan pendanaan mengakibatkan Indonesia mengalami risiko fiskal tinggi akibat bencana alam (Badan Kebijakan Fiskal, 2018).

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, kerugian dari bencana alam per tahun yang disebabkan bencana alam adalah sebesar Rp22.850,0 miliar. Bencana yang menyebabkan kerugian fiskal bagi negara. Peristiwa Tsunami di Aceh tahun 2004 tercatat menyebabkan kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Kemudian, gempa Yogya yang terjadi tahun 2006 mengakibatkan kerugian Rp29.150,0 miliar, gempa Padang yang terjadi pada tahun 2009 mengakibatkan kerugian Rp28.500,0 miliar, gempa disusul tsunami yang terjadi di Palu pada tahun 2018 mengakibatkan

kerugian sebesar Rp23.100,0 miliar, dan gempa yang terjadi NTB tahun 2018 mengakibatkan kerugian sebesar Rp18.200,0 miliar. Disamping itu terdapat kerugian bencana dari kebakaran lahan dan hutan tahun 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar. Kerugian bencana tersebut mengakibatkan risiko fiskal yang dari bencana alam yaitu kerugian secara finansial yang disebabkan bencana alam lebih tinggi daripada anggaran bencana yang dianggarkan dalam APBN (Nota Keuangan 2023, p.6-56).

Dalam rangka mitigasi risiko bencana, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menganggarkan melalui APBN berupa dana cadangan untuk penanggulangan bencana. Berdasarkan data dari Nota Keuangan tahun 2023, penyerapan dana cadangan dalam rangka penanggulangan bencana adalah sebesar Rp3.415,9 miliar per tahun dalam kurun waktu 2012–2022. Berdasarkan data tersebut sebenarnya anggaran dana cadangan bencana alam sudah cukup, dibuktikan dengan rendahnya *likelihood* yang berarti rasio ketidakcukupan bernilai kecil. Meskipun demikian, Indonesia tidak hanya mengalami bencana alam, terdapat pula bencana non alam yang melanda Indonesia seperti Covid-19. Bencana nonalam ini hingga 28 Juni 2020 telah menginfeksi 54.010 orang, dan mengakibatkan 2.754 orang meninggal dunia (BPBD Kabupaten Bogor, 2020).

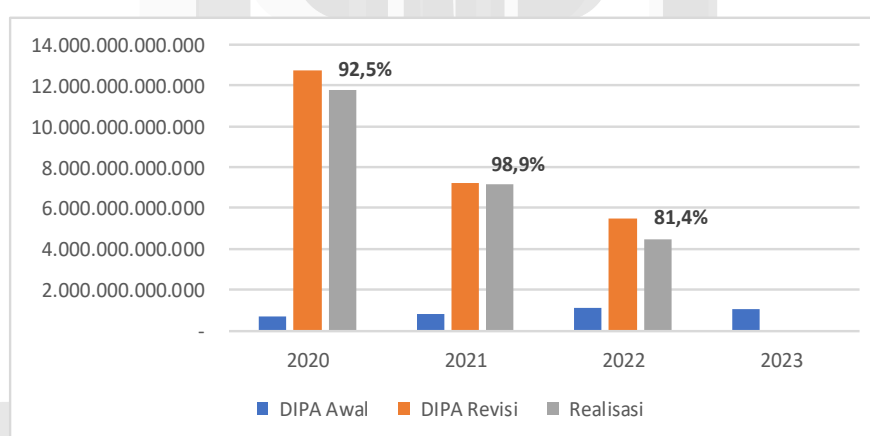
Kejadian bencana juga terjadi dalam bencana non alam yang juga mengintai Indonesia diantaranya gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, wabah penyakit, krisis, dan bencana sosial lainnya (bnpb.go.id, diakses 2023). Bencana nonalam juga memiliki dampak yang sangat substansial. Pada tahun 2019, Covid-19 sangat berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial di Indonesia (unair.ac.id, 2023). Dampak yang dihasilkan tersebut memaksa pemerintah harus melakukan upaya dalam penanganannya.

Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal tahun RPJMN 2019-2024 telah menyepakati alokasi anggaran yang tinggi untuk melaksanakan pendidikan dan mitigasi kebencanaan di Indonesia. Sebabnya yaitu, Indonesia terletak pada wilayah rawan bencana sehingga memerlukan kesiagaan dari seluruh komponen dalam menghadapinya (Kominfo, 2019). Program prabencana yang mempunyai fokus terhadap kepada minimalisasi risiko ialah sangat terbatas, belum dialokasikan anggarannya, mengikutsertakan pihak tertentu,

belum kepada semua pihak, dan belum terlaksana secara sistematis (Mirjas et.al 2021).

Sesuai UU nomor 24 tahun 2007, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan program penanggulangan bencana. Dalam rangka tugas dan fungsi ini, BNPB mendapatkan alokasi anggaran dari APBN untuk melaksanakan program penanggulangan bencana.

Gambar 1.3 Pagu Anggaran Penanggulangan Bencana pada BNPB



sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Pagu anggaran alokasi BNPB setiap tahunnya bertambah pada tengah tahun anggaran seiring dengan kejadian bencana baik bencana alam atau non alam. Pagu alokasi anggaran BNPB Tahun 2020 meningkat sesuai dengan penugasan BNPB selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tahun 2021 pagu penanggulangan covid mengalami penyesuaian seiring dengan pembagian kewenangan pelaksanaan penanganan covid dengan Kementerian Kesehatan. Tahun 2022 alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana alam telah dialokasikan Rp2.272,0 miliar sebagai Dana Siap Pakai, yaitu sebesar Rp250,0 miliar pada DIPA awal dan tambahan anggaran Rp2.022,0 miliar. Selain itu telah dialokasikan dana PC PEN untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1.989,0 miliar dan untuk penanganan wabah Penyakit Kuku dan Mulut sebesar Rp172,0 miliar.

Seiring peningkatan anggaran bencana yang dialokasikan oleh BNPB, secara terpisah ternyata dilokasikan juga anggaran dalam rangka penanganan bencana pada beberapa K/L sejalan dengan tugas dan fungsi sebagaimana penelitian terdahulu oleh Madjid (2020).

Tabel 1.1 Alokasi Anggaran Bencana dalam APBN

No.	Kementerian/Lembaga	Pagu (dalam Juta Rp)
1.	Kementerian Dalam Negeri	66.950,000
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	168.207,634
3.	Kementerian Sosial	235.189,850
4.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	10.239,00
5.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	18.078,500
6.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	986.245,600
7.	Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS)	837.529,057
Jumlah		2.322.439,641

Sumber: Madjid dalam Hari Apryana et.al 2020

Sejalan dengan penerapan *Performance Based Budgetting* pada penganggaran di Indonesia, informasi kinerja yang di susun oleh K/L dalam penanggulangan bencana masih sulit diidentifikasi dan berpotensi tumpang tindih. Sebanyak tujuh instansi berdasarkan identifikasi dan analisis peneliti terdahulu, mendapatkan alokasi anggaran dana bencana. Penyebaran alokasi anggaran ini akan menyebabkan kesulitan dalam mengukur efisiensi dan efektifitas. Hal ini juga akan berdampak pada penetapan institusi yang bertanggung jawab dalam menanggulangi bencana apabila terjadi bencana dalam pelayanan masyarakat (Hari Apryana et.al, 2020).

Praktek penerapan pengalokasian anggaran bencana yang rawan tumpang tindih dapat dilihat dari program Ina TEWS (*Indonesia Tsunami Early Warning System*). Ina TEWS merupakan suatu instrumen dalam peringatan dini gempa dan tsunami yang dikoordinir oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Sistem Ina TEWS berjalan dengan terintegrasi dengan pembagian tugas BMKG menjalankan jaringan seismometer, akselerometer, CCTV, dan pendeteksi tsunami; Badan Informasi Geospasial (BIG) mempunyai tugas mengoperasikan GPS serta *tide gauge*; BRIN bertugas mengoperasikan alat apung BUOY serta jaringan bawah laut; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengoperasian

radar tsunami (TV One news, 2023).

Pembagian tugas terkait bencana tersebut tidak diringi dengan keselarasan program karena masih terbawa dengan struktur yang bersifat *default* pada rencana kerja. Misal, BRIN menyelenggarakan Program Riset dan Inovasi, BIG menyelenggarakan Program Informasi Geospasial, dan BMKG melaksanakan Program Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Renja K/L, 2023). Selanjutnya rincian jabaran program tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan tentunya akan mengikuti referensi di atasnya (*cascading*). Hal ini tentunya akan menyulitkan dalam mengukur tumpang tindihnya anggaran bencana yang dialokasikan apabila tidak ada instrumen yang bisa memotret secara utuh pendanaan suatu program.

Kementerian/Lembaga dalam pengalokasian anggaran bencana masih menggunakan pendekatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (sektoral), sehingga belum mencerminkan penanganan bencana yang terintegratif sesuai dengan prioritas penanganan bencana. Alokasi anggaran bencana yang menyebar akan menyebabkan anggaran tidak fokus serta pengukuran kinerja efektifitas dan efisiensi akan sulit dilakukan pengukuran. Selanjutnya akan berdampak pada penetapan institusi yang mengkoordinasikan dan mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan bencana ketika masyarakat menyerukan ketidakpuasan. Lebih lanjut pengukuran terkait efisiensi anggaran akan sulit diukur akibat pendanaan yang tersebar di berbagai institusi (Hary Apriyana, 2020).

Menurut Madjid (2018), pengalokasian anggaran bencana di Indonesia tidak efektif dan efisien. Penyebabnya yaitu, pendekatan dalam penganggaran yang masih kuno, terdapat duplikasi anggaran, serta tidak adanya *tools* untuk pengukuran kinerja bagi entitas pemerintah yang mengalokasikan dana bencana. Disamping itu, pemerintah masih berketat pada masalah lemahnya mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan adanya dampak buruk lemahnya intervensi pemerintah terhadap bencana pada suatu sistem politik anggaran, baik pada *scope* nasional atau di daerah. Indonesia yang sebagian besar daerahnya rawan terjadi bencana, prinsip pengutamakan anggaran dalam suatu politik terkait mitigasi bencana belum diimplementasikan secara utuh. Masalah terkait pencegahan serta usaha dalam minimalisasi dampak bencana belum menjadi fokus dari perumus dan penyusun kebijakan anggaran.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tentang Pagu Alokasi Anggaran TA 2023, optimalisasi RSPP masih digaungkan dengan melakukan penyempurnaan RSPP sesuai ketentuan yang telah berjalan. Ini menandakan proses penganggaran anggaran bencana pada K/L, di tinjau dari sisi regulasi juga belum sepenuhnya sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) karena masih terjadi tumpang tindih pengalokasian anggaran. Sejatinya RSPP merupakan instrumen yang didesain untuk lebih memperkuat sinergi antar unit pada K/L dengan memfasilitasi rumusan informasi kinerja yang dapat dilakukan lintas eselon I dan II dalam mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 yang dijelaskan rinciannya pada Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 6 Tahun 2022 masih belum diatur bagaimana cara mengintegrasikan program yang bersifat lintas antar kementerian. Dalam mengalokasikan anggaran bencana, juga belum terdapat *tagging* pendanaan terkait bencana pada sistem penganggaran yaitu SAKTI serta peraturan yang melandasinya. Selain itu, informasi kinerja yang dibangun dalam anggaran kebencanaan belum terdapat format baku yang diatur dalam peraturan. Hal ini kurang sesuai dengan semangat penerapan *money follow program* prioritas, dan dapat mengakibatkan potensi duplikasi pendanaan serta inefisiensi yang semakin melebar.

Sebagai mitra kerja yang menangani langsung anggaran kebencanaan, Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan penganggaran salah satunya yang terkait dengan kebencanaan. Dalam mengawal implementasi RSPP yang optimal masih diperlukan rekomendasi kebijakan dalam pengalokasian anggaran kebencanaan bidang tertentu pada K/L atau sering dikenal dengan anggaran tematik bidang.

Selanjutnya, penelitian ini menitik beratkan pada analisis penyusunan informasi kinerja anggaran tematik bencana pada Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang dapat diinisiasi DJA untuk dapat lebih

mengoptimalkan penerapan RSPP. Pengalokasian anggaran bencana belum terintegratif sesuai amanah UU Nomor 24 Tahun 2007. Dari hal-hal dan permasalahan yang terjadi terkait anggaran tematik bencana penulis ingin membangun sebuah informasi kinerja yang terintegrasi dipotret dari konsep berfikir yang logis sesuai pedoman RSPP yang diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dalam penganggaran bencana yang *measurable*, sinergi, dan integratif yang dapat dilakukan bersifat lintas unit organisasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengambil penelitian yang berjudul “Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi adalah:

1. Indonesia berpotensi tinggi terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian dan risiko potensi fiskal bencana. Dalam menanggulangnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bencana dari APBN yang tersebar pada DIPA Kementerian/Lembaga. Dalam pengalokasian anggaran bencana tersebut, Kementerian/Lembaga masih menyusunnya secara sektoral.
2. Informasi kinerja anggaran sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pengalokasian anggaran bencana yang masih bersifat sektoral belum mencerminkan *money follow program*.
3. Informasi kinerja yang disusun juga belum dapat menggambarkan secara utuh alokasi pada pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana berdasarkan regulasi penanggulangan bencana, hal ini berpotensi anggaran yang tumpang tindih.
4. Anggaran tematik yang merupakan alokasi anggaran yang memuat bidang-bidang tertentu yang merupakan tema dan sasaran prioritas nasional belum memunculkan anggaran tematik bencana sebagai suatu tema prioritas.
5. Informasi kinerja pengalokasian anggaran bencana masih berfokus pada masing-masing tujuan organisasi K/L sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L, belum terlihat keterkaitan/*cascading* antar lini informasi kerjanya,

utamanya pada program lintas sesuai amanat Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

6. Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran yang mempunyai tugas dalam melakukan bimbingan teknis penganggaran kepada mitra belum memberikan model/gambaran spesifik bagaimana RSPP di terapkan pada lintas Kementerian, termasuk pada alokasi anggaran untuk bencana.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan inti dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengalokasian anggaran penanggulangan bencana pemerintah pusat setelah penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran?
2. Bagaimana model informasi kinerja anggaran tematik bencana pada Kementerian/Lembaga yang dapat diinisiasi oleh Ditjen Anggaran dalam rangka optimalisasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana pada pemerintah pusat setelah penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
2. Untuk menyusun model informasi kinerja anggaran tematik bencana pada Kementerian/Lembaga yang dapat diinisiasi oleh Ditjen Anggaran dalam rangka optimalisasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya membawa manfaat bagi:

1. Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu administrasi manajemen keuangan negara khususnya bidang penganggaran sebagai salah satu rekomendasi dalam bentuk pola penganggaran sektor publik.

2. Dunia Praktisi

Bagi Pemerintah, khususnya pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai salah satu pilihan dalam pembuatan regulasi penganggaran khususnya anggaran tematik lainnya, seperti anggaran tematik perubahan iklim, anggaran tematik percepatan penurunan *stunting*. Lebih lanjut diharapkan dapat menjadi suatu gambaran umum bagi Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana untuk mewujudkan belanja publik yang berkualitas.

